IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Ade Hendri Alamsyah

Program Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya

Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Implementation of Regional Regulation Number 1 Year 2013 About Social and Environmental Responsibility. This study aims to determine the implementation Siak District Regulation Number 1 Year 2013 About Corporate Social Responsibility and Environment in Siak and obstacles encountered in implementing Siak District Regulation Number 1 Year 2013 About Corporate Social Responsibility in Siak. This type of research is the use descriptive research. While the research informants include officials and employee who is on BAPPEDA Siak involved as the Forum of Corporate Social Responsibility (CSR) Siak, the company chosen by the researchers BOB PT. Bumi Siak Pusako and communities. Analysis of the data obtained were analyzed from data presentation, data reduction, verification and conclusion. Implementation of Regional Regulation Number 1 Year 2013 About Social and Environmental Responsibility in Siak materialized with the establishment of a forum with the CSR Forum Siak in order to realize corporate social responsibility for the community and also responsibility towards environmental integrity of the company's operations in the region. Tanggaung environmental and social responsibility undertaken by each company in Siak district, is part of the company's participation in the construction melaksanakan Siak Regency. Obstacles to be a factor in creating effective policies encountered in the research and discussion, it is known is, the lack of availability of technical personnel.

Keywords: CSR, environment, policy implementation

Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Kabupaten Siak dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan informan penelitian meliputi pejabat dan pegawai yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak yang terlibat sebagai *Forum Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Siak, pihak perusahaan yang dipilih oleh peneliti yakni BOB PT. Bumi Siak Pusako dan juga masyarakat. Analisis data yang diperoleh dianalisis mulai dari penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak terwujud dengan dibentuknya forum bersama yakni Forum CSR Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat dan juga tanggung jawab terhadap keutuhan lingkungan diwilayah operasional perusahaan tersebut. Tanggaung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, merupakan bagian dari partisipasi perusahaan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Siak. Kendala yang menjadi faktor dalam mewujudkan kebijakan yang efektif yang ditemui dalam hasil penelitian dan pembahasan, diketahui adalah, kurangnya ketersediaan tenaga teknis.

Kata kunci: CSR, lingkungan, implementasi kebijakan

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Siak menegupayakan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen yang ada di Kabupaten Siak termasuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Siak. Setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak, dituntut untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan juga berpartisipasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Siak. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak adalah, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) di Kabupaten Siak, didasari oleh landasan hukum sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- 3) Peraturan Menteri BUMN Per-20/MBU/2012 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Corporate social responsibility (CSR) berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan serta tanggung jawab sosial perusahaan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Kepedulian Kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara sing-

kat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi didalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemasyarakatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengahruskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap suatu pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Bisnis adalah aktivitas mulia, didalamnya terdapat suatu kegiatan, ekonomi penciptaan lapangan kerja dan mendatangkan kontribusi pajak. Alangkah indahnya jika bisnis dijalankan tidak hanya sekedar mencari profitabilitas semata, namun juga dengan penuh martabat dan hati nurani, karena sesungguhnya “sebaik-baik manusia adalah mereka yang keberadaannya bermanfaat untuk orang banyak”. (Buletin CSR Kabupaten Siak, 2013). Sehubungan dengan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam masyarakat, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi kebijakan dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak.

Implementasi kebijakan menurut William dan Elmore dalam Sunggono (2004) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan Wibawa (2001) mengatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dalam cara mencapai sasaran tersebut terkandung beberapa komponen lain yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Didalam cara ini komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas dan kemudian diinterprestasikan. Cara-cara mencapai sasaran ini biasa disebut dengan implementasi kebijakan.

Mazmanian dan Sabetier dalam Wahab (2001) mengungkapkan bahwa, peran penting dari analisis implementasi kebijakan Negara ialah mendefinisikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan, 2) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi, dan 3) pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Edwar III dalam Indiahono (2009) mengatakan bahwa model implementasi kebijakan publik, menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak, dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah pejabat dan pegawai BAPPEDA Kabupaten Siak, pihak perusahaan dan masyarakat yang dapat bantuan CSR. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumen. Data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan secara argumentasi setiap informasi yang diperoleh dari informan penelitian. Prosedur analisis mulai dari penyajian data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Komunikasi

Transmisi

Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian yakni Bapak Risa Gustian Kepala Sub Bidang Litbang, beliau mengatakan bahwa; “Penyaluran komunikasi bagi setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, dilakukan melalui rapat dengan perusahaan yang ada yang tergabung dalam forum CSR. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan terhadap masyarakat tempatan. Sebelum adanya Perda tersebut, sudah dilaksanakan rapat pembentukan forum CSR pada tanggal 1 Maret 2012. pada rapat tersebut disampaikan berbagai kebijakan yang akan dibuat termasuk kebijakan dalam pembuatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak”. Wawancara di atas menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, melalui saluran komunikasi (transmisi) hanya dalam bentuk pertemuan melalui form CSR Kabupaten Siak, yang dilaksanakan dalam satu kali dalam satu tahun.

Kejelasan

Wawancara dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT. Bumi Siak Pusako, yakni Ibu Yusrina Ey Kepala CSR PT. Bumi Siak Pusako yang mengatakan bahwa; “Kami sebagai pihak perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan minyak bumi dan gas alam, kami memahami adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Sebelum adanya peraturan daerah tersebut, pihak perusahaan juga sudah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat tempatan. Kita setiap tahun memberikan bantuan kepada masyarakat hingga saat ini. Tahun 2013 kita membangun 1 unit lokal MTSn di Kecamatan Pusako, tahun 2014 dibangun 1 kelas

Madrasah Aliyah di Kecamatan Sabak Auh dan tahun 2015 pelaksanaan pembangunan pesantren Darul Qur'an di Kecamatan Sungai Apit". Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian di atas dapat diketahui bahwa, pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, khususnya PT. Bumi Siak Pusako telah menjalankan program CSR, dimulai dari berdirinya perusahaan tersebut. Program CSR tersebut sudah dijalankan sebagai tanggungjawab perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan.

Konsisten

Wawancara dengan informan penelitian yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BAPPEDA Kabupaten Siak, yakni Bapak Faisal Harap, dia mengatakan bahwa; "Upaya Pemerintah Kabupaten Siak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, adalah untuk melihat wujud nyata bagi setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat tempatan, sehingga perusahaan mempunyai kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan serta pembangunan di Kabupaten Siak. Hal ini diperlukan sikap yang konsisten antara pihak Pemerintah Kabupaten Siak dan pihak perusahaan yang tergabung dalam forum CSR Kabupaten Siak. BAPPEDA sebagai koordinator CSR tetap konsisten untuk mengkomunikasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak bagi setiap perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Siak". Wawancara di atas membuktikan adanya konsistensi dalam mengkomunikasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, khususnya perusahaan yang sudah tergabung dalam forum CSR Kabupaten Siak.

Sumber Daya

Hasil wawancara peneliti dengan

informan penelitian, yakni dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Siak Bapak Azman Yonanto yang mengatakan bahwa; "Upaya pemerintah Kabupaten Siak untuk mewujudkan adanya tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat di Kabupaten Siak, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, merupakan payung hukum bagi Pemkab Siak untuk merangkul seluruh perusahaan yang ada, agar mereka memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun kita sebagai wadah (BAPPEDA) forum CSR Kabupaten Siak, memiliki keterbatasan staf dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Upaya yang dilakukan selama ini hanya bersifat pertemuan dengan seluruh pimpinan perusahaan dengan pemerintah". Wawancara di atas menunjukkan bahwa, masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Kepala Sub Bidang IPTEK BAPPEDA Kabupaten Siak, Bapak Faisal Harahap yang mengatakan bahwa; "Penyebaran informasi tentang adanya tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak yang memiliki payung hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, dilaksanakan melalui rapat-rapat forum CSR dan juga penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik. Kesemua upaya ini bertujuan untuk menyebarkan secara luas tentang informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Informasi juga disampaikan melalui Humas perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, sehingga terjalin komunikasi antara SKPD yang mewadahi forum CSR dengan pihak

perusahaan melalui Humas tersebut. Dengan demikian informasi yang disampaikan akan menghasilkan komunikasi dua arah, baik dari pihak perusahaan, maupun dari pihak pemerintah dalam mewujudkan partisipasi perusahaan dalam pembangunan di Kabupaten Siak”. Wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya untuk menyebarkan informasi sudah dilakukan secara bertahap dan rutin oleh Sekretariat Forum CSR yang berada pada BAPPEDA Kabupaten Siak.

Disposisi

Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama Bapak Risa Gustian, beliau mengatakan bahwa; “Penempatan pegawai dalam Sekretariat Forum CSR Kabupaten Siak adalah orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak, karena personil yang ditempatkan pada Sekretariat Forum CSR merupakan staf yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi dan kerjasama, mengingat BAPPEDA Kabupaten Siak diberikan amanah untuk mengelola kegiatan CSR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa penempatan orang-orang yang duduk dalam lingkungan birokrasi, khususnya pada Sekretariat Forum CSR pada BAPPEDA Kabupaten Siak, perlu juga dilakukan penyesuaian, agar personil yang ditempatkan memahami tentang konsep CSR.

Struktur Birokrasi

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Siak, Bapak Azman Yohanto, yang mengatakan bahwa; “SOP yang disusun dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, tidak disusun secara mendetail, akan tetapi kita melaksanakan perda tersebut berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk laksana, dalam rangka membeentuk komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh perusa-

haan yang beroperasi di Kabupaten Siak, sehingga terbentuk forum bersama yang disebut dengan Forum CSR Kabupaten Siak. Dalam forum inilah kita menyampaikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga tujuan dari Perda tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota Forum CSR (perusahaan), yang tujuannya dapat mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah operasional perusahaan tersebut”. Wawancara di atas menunjukkan bahwa SOP khusus yang dibuat tidak ada, namun untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, hanya berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk laksana berdasarkan SK Bupati Siak tentang pembentukan Forum CSR Kabupaten Siak.

PEMBAHASAN

Bappeda berperan Sebagai fasilitator yang akan melakukan sosialisasi dan informasi kepada para perusahaan/dunia usaha yang berada di Kabupaten Siak, sehingga berkomitmen untuk berjalan seiring sejalan dengan pemerintah kabupaten Siak dalam mengurangi permasalahan sosial dan lingkungan. Disini jelas sekali bahwa BAPPEDA Kabupate Siak merupakan salah satu lembaga yang mengawal implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Mengingat banyaknya perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR Kabupaten Siak, maka peneliti mengambil atau menetapkan perusahaan yang menjadi objek penelitian yakni BOB PT. Bumi Siak Pusako. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak dapat ditelusuri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran

(target group). Komunikasi disini dimaksud adalah komunikasi dari seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Siak untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, termasuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Komunikasi yang baik dan lancar akan memudahkan Pemerintah Kabupaten Siak melalui BAPPEDA Kabupaten Siak sebagai koordinator Forum CSR Kabupaten Siak, dalam mengukur pelaksanaan peraturan daerah tersebut, sehingga seluruh perusahaan yang ada akan turut serta dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Siak.

Dari aspek sumber daya menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Hal ini dimaksudkan adanya keselarasan dari sumber daya manusia dan sumber daya dana yang mencukupi dalam mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, karena jumlah staf yang ada untuk mengelola CSR terbatas. Mereka hanya berada dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni BAPPEDA Kabupaten Siak dan berada di bawah Bidang Penelitian dan Pengembangan. Kemudian adanya upaya untuk menyebarkan informasi sudah dilakukan secara bertahap dan rutin oleh Sekretariat Forum CSR yang berada pada BAPPEDA Kabupaten Siak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yang bedomisili di Kabupaten Siak dan diharapkan sesuai dengan himbauan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tang-

gung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak.

Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, sudah memiliki pembagian kewenangan yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak dan pelaksanaan kewenangannya tersebut juga sudah dibagi dan diarahkan dalam Forum CSR Kabupaten Siak. Kewenangan yang dilimpahkan dalam Sekretariat Forum CSR Kabupaten Siak, bersifat kewenangan yang tidak terlalu formal, akan tetapi dapat dilaksanakan oleh semua anggota forum CSR dan juga pegawai BAPPEDA yang ditunjuk untuk mengelola Sekretariat Forum CSR yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak. Selanjutnya sumber daya juga meliputi fasilitas yang menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, sudah memadai namun belum tersedia dengan lengkap untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dan juga tanggung jawab dalam memelihara lingkungan. Akan tetapi jika ada persoalan yang perlu dilakukan uji labor seperti pembuangan limbah, maka pihak BAPPEDA akan bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak

Disposisi salah satu pendukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Disposisi tersebut menyangkut kejujuran, komitmen dan sikap demokratis dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Kabupaten Siak. Kesemua indikator disposisi tersebut sudah dijalankan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak.

Disposisi yaitu menunjuk adanya komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ma-

syarakat dan lingkungannya di Kabupaten Siak, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Komitmen tersebut dilihat dari orang-orang yang bertanggung jawab dan tunjangan bagi mereka dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Disposisi meliputi pengangkatan jabatan birokrat dan pemberian insentif untuk menjang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, sudah berjalan dengan baik, namun belum mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Siak tersebut.

Struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Hal ini dimaksudkan bahwa adanya kejelasan kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Struktur birokrasi yang melahirkan SOP khusus belum ada, namun untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, hanya berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk laksana berdasarkan SK Bupati Siak tentang pembentukan Forum CSR Kabupaten Siak.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak, yang dimulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, memiliki hubungan yang sangat erat dalam

melaksanakan suatu kebijakan. Kesemua indikator tersebut saling mendukung demi terrealisasinya sebuah kebijakan termasuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Siak terwujud dengan dibentuknya forum bersama yakni Forum CSR Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat dan juga tanggung jawab terhadap keutuhan lingkungan di wilayah operasional perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, merupakan bagian dari partisipasi perusahaan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Siak

Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak, adalah belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami tentang program CSR, belum tersedianya anggaran yang tetap dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Siak, fasilitas untuk operasional survey juga belum tersedia, dan belum adanya koordinasi yang jelas dengan birokrasi di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

DAFTAR RUJUKAN

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Santoso, Amir. 2000. *Analisis Kebijakan Publik; Suatu pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia
- Wahab Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibawa, Samodra, dkk. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi